



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
Jl. Alun-alun Utara No. 1 Kajen**



## KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah ini dapat kami sampaikan kepada Ibu Bupati sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Isi yang terkandung dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan Good Governance di Kabupaten Pekalongan.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021, semoga laporan ini bermanfaat.

Kajen, 22 Februari 2022



Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pekalongan

M. YULIANI BAR, S.Sos., M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19750710 199903 1 008

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pekalongan secara langsung didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, secara khusus penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 Rencana Strategik Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 merupakan kerangka acuan bagi penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan yang disusun setiap tahun dengan dukungan dana APBD Kabupaten Pekalongan sekaligus untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Pekalongan.

Semua pelaksanaan pembangunan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik di jajaran Sekretariat Daerah maupun masyarakat umum. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana Instruksi Presiden melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian dipertegas kembali melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada tahun 2021 yang merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD 2016 – 2021 ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2021. Hasil pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 8 (delapan) sasaran adalah 96,43 %, keberhasilan ini diberikan oleh 8 (delapan) sasaran menunjukkan capaian kinerja 80 - 100%, secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

NO.	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis	Presentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	80
2.	Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase produk hukum yang ditindaklanjuti (%)	100
3.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase unit pelayanan publik yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (%)	100
4.	Meningkatkan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah	Presentase kebutuhan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi (%)	100
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Capaian nilai evaluasi AKIP (%)	91,45% )*
6.	Meningkatnya capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Presentase potensi SDA yang teridentifikasi (%)	100
7.	Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian pembangunan	Presentase pengadaan barang jasa yang difasilitasi ULP (%)	100
8.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	Tingkat pengelolaan penatausahaan Sekretariat Daerah (%)	100
<b>Rata - rata</b>			96,43

Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah menganggarkan kegiatan dengan baik dan relevan dengan dokumen sasaran strategis.

Kajen, 22 FEBRUARI 2022



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum .....	1
B. Fungsi Strategis .....	2
C. Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan .....	2
D. Sumber Daya Manusia ( SDM ) .....	3
E. Permasalahan Utama yang Dihadapi .....	5
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis .....	6
B. Perjanjian Kinerja .....	15
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
B. Pengukuran Kinerja .....	18
C. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	19
D. Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	41
B. Prestasi yang diraih.....	41
C. Hal – Hal yang Ingin Dicapai Ditahun Mendatan.....	42
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Pekalongan perlu penataan organisasi pemerintahan yang baik yaitu organisasi yang efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dan dengan mewujudkan aparatur pemerintahan yang produktif, profesional, berkarakter, akuntabel dan dengan dukungan sistem mekanisme kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, diyakini mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang baik. Sejalan dengan RPJM Nasional yang pada nilainya menggarisbawahi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat dengan lebih produktif, profesional, transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna.

Penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah tugas membantu Bupati dalam penyusunan

kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 merupakan gambaran kinerja Sekretariat Daerah dalam tahun 2021 yang berpedoman pada Peraturan Daerah tersebut serta RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, terutama capaian sasaran yang telah ditetapkan.

## **B. FUNGSI STRATEGIS**

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dimaksud, maka Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan pemerintah Daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pembinaan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.**

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
    - b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; dan
    - c) Sub Bagian Otonomi Daerah Dan Kerjasama.

2. Bagian Hukum, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
  - b) Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM; dan
  - c) Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan; dan
  - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan.
- c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahi:
  1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah; dan
    - b) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
  2. Bagian Pembangunan, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan; dan
    - c) Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan.
  3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
    - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pembinaan Pengadaan
    - b) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan
    - c) Sub Bagian Evaluasi, Pelaporan dan Penyelesaian Sanggah
- d. Asisten Administrasi, membawahi:
  1. Bagian Organisasi Dan Kepegawaian, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
    - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Dan Kelembagaan.
  2. Bagian Umum, terdiri dari:
    - a) Sub Bagian Protokol Dan Rumah Tangga Pimpinan;
    - b) Sub Bagian Keuangan; dan
    - c) Sub Bagian Peralatan Dan Perlengkapan.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )**

Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Desember 2021 berjumlah 147 orang, yang terdiri dari 145 Orang ASN dan 2 Orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah (orang)	Persentase (%)
		L	P	L	P		
1	SD	3	-	-	-	3	2,05%
2	SMP Sederajat	4	-	-	-	4	2,72%
3	SMA Sederajat	32	4	-	1	37	25,17%
4	D3	5	8	-	1	14	9,52%
5	S1	39	33	-	-	72	48,98%
6	S2	11	6	-	-	17	11,56%
7	S3	-	-	-	-	-	-
	<b>Jumlah (orang)</b>	94	51	-	2	147	100%
	<b>Persentase (%)</b>	63,95%	34,69%	-	1,36%	100%	

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 27 Desember 2021

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan di Sekretariat Daerah :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	5	-	5
1	Golongan II	29	8	37
2	Golongan III	48	42	90
3	Golongan IV	11	2	13
	<b>Total</b>	93	52	145

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 27 Desember 2021

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan di Sekretariat Daerah :

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan**  
**di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	3	1	4
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV	11	10	21
4	JFT	9	9	18
5	Staf	66	31	97
	<b>Total</b>	94	51	145

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 27 Desember 2021

## **E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dan perlu adanya pemecahan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain :

- a) Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan kurang profesional. Salah satu indikator belum maksimalnya kualitas SDM dapat dilihat dari tenaga SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya masih sangat kurang misalnya, tenaga teknis di bidang perencanaan, tenaga pengkajian di bidang hukum, pengelolaan keuangan/akuntan, analisa jabatan/kepegawaian dan arsiparis.
- b) Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah.
- c) Peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah belum efektif baik antar sektor dan antar fungsi maupun internal dan eksternal
- d) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Perangkat Daerah
- e) Belum tersedianya pemanfaatan standar operasional monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi
- f) Sinergitas antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaan belum optimal
- g) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Sistematika penyajian LKjIP:**

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I      Pendahuluan

Bab II     Perencanaan Kinerja

Bab III    Akuntabilitas Kinerja

Bab IV    Penutup

Lampiran - lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021.

Dalam rangka mewujudkan  misi ke-3 dan ke-4  RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2021, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 - 2021, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Non Urusan**

Untuk mendukung visi, misi, strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat Tahun 2016 – 2021, program Sekretariat Daerah pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan fokus kegiatan pada:
  - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
  - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
  - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
  - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- b. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan fokus kegiatan pada :
  - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
  - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
  - Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

## 2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Umum

- Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penataan Organisasi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk rencana induk ( Master Plan ) secara komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (Competitive Advantage) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (Competitive Disadvantage).

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudkan suatu pelayanan yang prima. Selanjutnya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## 1. Visi

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur staf Pemerintah Kabupaten harus mampu mempunyai Visi yang mendorong dan merangsang kinerja untuk mewujudkan gambaran masa depan yang diinginkan.

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Oreintasi pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun yang akan datang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi Kabupaten Pekalongan tahun 2016 – 2021 adalah :

***”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”***

Tabel 2.1  
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
<b>Sejahtera</b>	merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan, terciptanya hubungan antar rakyat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedia sarana prasarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik
<b>Religius</b>	merupakan kondisi masyarakat yang memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap agama, kepercayaan, dan keyakinan yang diyakininya. Kondisi masyarakatnya saling menghormati agama, kepercayaan dan keyakinan agama lain, beriman dan bertakwa yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari

UNSUR VISI	PENJELASAN
<b>Berkelanjutan</b>	yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Pekalongan yang memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya
<b>Berbasis Potensi Lokal</b>	yang dimaksud adalah Kabupaten Pekalongan memiliki potensi sumberdaya lokal yang bisa dikembangkan dengan optimal, menjadi modal dalam mencapai Kabupaten Pekalongan yang sejahtera dan bermartabat. Sumberdaya lokal dimaksud antara lain adalah potensi industri kerajinan batik, tenun dan produk tekstil lainnya, potensi ekonomi, potensi sumberdaya alam lainnya serta potensi sistem sosial budaya masyarakat dengan ciri religiusitas yang menonjol dan berkelanjutan

Sumber : Renstra Setda 2016-2021

## 2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diatas, haruslah ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu Instansi Pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu Instansi Pemerintah yang ingin dicapai.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kabupaten Pekalongan tahun 2016 - 2021 adalah:

- 1) Meningkatkan fasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, pertanian, peternakan dan perikanan;
- 2) Mewujudkan rasa aman dan adil pada masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik;
- 4) Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang professional, bersih dan berakhlak;
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan;
- 6) Memantapkan potensi social budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah;
- 7) Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan **14 (Empat Belas) Program Prioritas**, yaitu

- (1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- (2) Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
- (3) Program Pengembangan Destinasi Wisata;
- (4) Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- (5) Program Pembangunan Pusat Laboratorium Alam Perubahan Iklim Petungkriyono;
- (6) Program Peningkatan Daya Saing Daerah berbasis Potensi Lokal;
- (7) Program Pengembangan Kawasan Industri;
- (8) Program Peningkatan Kedaulatan Pangan;
- (9) Program Peningkatan Sistem Pelayanan Publik;
- (10) Program Peningkatan Keamanan dan Budaya Tertib Masyarakat
- (11) Program Pemerataan Pembangunan Infrastruktur;
- (12) Program Penataan Permukiman Kumuh;
- (13) Program Pengendalian Banjir dan Rob;
- (14) Program Pendirian BUMD.

### **3. Dua Belas Mandat Rakyat**

1. Penerbitan KARTU ASRI SEHAT (Jaminan Kesehatan, Persalinan, Khitan, Santunan Kematian) dan KARTU ASRI CERDAS (Gratis Pendidikan Dasar dan Menengah).
2. Subsidi biaya pendidikan di perguruan tinggi.
3. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan percepatan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, pasar, jaringan listrik bantuan aspal dan semen) dan jaminan ketersediaan air bersih melalui: menambah jumlah sumur bor dan sumur dalam, pembangunan embung baru.
4. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah atas, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan wiyata bakti, guru dan guru madrasah (MI, MTs dan MA), guru MDA/TPQ/TPA, pengasuh pondok pesantren, Takmir masjid serta guru ngaji (ustadz).
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian melalui: ketersediaan benih unggul, pengairan, pupuk (organic dan unorganik), tenaga penyuluh pertanian dan bantuan peralatan pertanian (traktor, pompa air, tangki semprot dan lain-lain).
6. Mendorong pertumbuhan UMKM melalui ketersediaan bahan baku, peningkatan kualitas produksi, fasilitas kebutuhan permodalan, menambah jaringan dan pembangunan pasar-pasar baru dan hak paten.

7. Membuka kesempatan investasi melalui: kemudahan perijinan, jaminan keamanan, ketersediaan tenaga terampil, dukungan infrastruktur, menyediakan 2.000 hektar lahan investasi untuk menciptakan 100.000 lapangan kerja baru serta melindungi hak-hak normatif baru.
8. Mendorong pertumbuhan budidaya ikan air tawar dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan ketersediaan BBM, kualitas pelayanan TPI, pembangunan dermaga dan pengerukan sungai Jambean dan Wonokerto serta pembangunan pabrik es balok.
9. Melakukan rekayasa/penataan social dan lingkungan untuk menghadapi fenomena banjir rob.
10. Menanamkan kembali 1 juta pohon untuk kelestarian lingkungan.
11. Melestarikan seni dan budaya.
12. Mewujudkan Birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih.

Dari visi misi dan 12 Mandat Bupati Pekalongan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mendukung dan akan **mewujudkan misi ke-3 dan ke-4, yaitu “Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik” dan “Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih dan berakhlak”** dan mewujudkan Dua Belas Mandat Rakyat nomor 12, yakni.”**Mewujudkan Birokrasi yang melayani, disiplin dan bersih”**.

#### 4. Tujuan

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka perlu disusun tujuan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu **Meningkatkan koordinasi kebijakan dan pelayanan administratif daerah.**

#### 5. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis.
2. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
4. Meningkatnya kinerja Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
6. Meningkatnya capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
7. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian pembangunan
8. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai yang dilaksanakan dalam dalam jangka waktu lima tahun kedepan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Misi 3 : Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik</b>									
1.	Meningkatkan koordinasi kebijakan dan pelayanan administratif daerah	Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Misi 4 : Menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang professional, bersih dan berakhlak</b>									
2.		Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan	Persentase Produk Hukum yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah							
3.		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase Unit Pelayanan Publik yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.		Meningkatnya kinerja Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Persentase Kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi AKIP	55,79	58,81	60,00	63,00	65,00	70,00
6.		Meningkatnya capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Persentase potensi SDA yang teridentifikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.		Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian pembangunan	Persentase Pengadaan Barang Jasa yang difasilitasi ULP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.		Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.	Tingkat pengelolaan penatausahaan Sekretariat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan 2016-2021

## 6. Kebijakan.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan tugas Sekretaris Daerah adalah tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan program, petunjuk pelaksanaan, koordinasi, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, dan administrasi pemerintahan, serta otonomi daerah dan kerjasama daerah. dengan jumlah anggaran Rp. 924.412.900,00 oleh Bagian Tata Pemerintahan.
- b. Pelaksanaan koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan daerah, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum/advokasi aparatur pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara, memberikan bantuan hukum/advokasi kepada masyarakat miskin, upaya perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia, dokumentasi, publikasi dan informasi produk hukum dana Rp. 594.173.400,00 oleh Bagian Hukum.
- c. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengumpulan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan dan pengawasan, peningkatan sarana prasarana, produksi, potensi Daerah di bidang ekonomi dan penyertaan modal, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan serta pelaksanaan Pemantauan kebijakan dibidang SDA dengan jumlah dana Rp.607.813.400,00 oleh Bagian Perekonomian.
- d. Pelaksanaan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan penyusunan program, pengendalian pembangunan Daerah, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan Daerah dengan jumlah dana Rp. 435.662.100,00 oleh Bagian Pembangunan.
- e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan monitoring kegiatan sosial kemasyarakatan, agama, pendidikan dan kebudayaan dengan jumlah dana Rp. 7.096.960.700,00 Bagian Kesra.
- f. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur dan kelembagaan. dengan jumlah dana Rp. 1.313.494.400,00 oleh Bagian Organisasi Dan Kepegawaian.

- g. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan keprotokolan, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan dengan jumlah dana Rp. 29.062.394.360,00 oleh Bagian Umum.
- h. Pelaksanaan Koordinasi dan Pelayanan, perencanaan, pembinaan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta penyelesaian sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah dengan jumlah dana Rp. 1.138.830.500,00 pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

## **B. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah merupakan proses penyusunan rencana kinerja tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam kurun waktu tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran – sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2021. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya tujuan strategis Sekretariat Daerah yang akan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Secara singkat Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021 secara lengkap disajikan dalam table berikut:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan

NO.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis	Presentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	100,00
2.	Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase produk hukum yang ditindaklanjuti (%)	100,00
3.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase unit pelayanan publik yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (%)	100,00
4.	Meningkatkan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah	Presentase kebutuhan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi (%)	100,00
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Capaian nilai evaluasi AKIP (%)	70,00 (B)
6.	Meningkatnya capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Presentase potensi SDA yang teridentifikasi (%)	100,00

<b>NO.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja Tahun 2021</b>
7.	Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian pembangunan	Presentase pengadaan barang jasa yang difasilitasi ULP (%)	100,00
8.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	Tingkat pengelolaan penatausahaan Sekretariat Daerah (%)	100,00

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **B. PENGUKURAN KINERJA**

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran

dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

### C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta

mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Skala Penilaian dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala seperti di bawah ini :

- a. Lebih dari 100%      Sangat Baik
- b. 75 – 100%            Baik
- c. 55 – 74 %            Cukup
- d. Kurang dari 55 %    Kurang

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana strategis 2016 - 2021, untuk tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2021 dan perjanjian kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 8 (delapan) sasaran. Hasil pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 8 (delapan) sasaran adalah 96,43 %, keberhasilan ini diberikan oleh 8 (delapan) sasaran menunjukkan capaian kinerja 80 - 100%, secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan**

NO.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis	Presentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	100%	80 %	80
2.	Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk	Presentase produk hukum	100%	100%	100

NO.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021	(%)
1	2	3	4	5	6
	hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	yang ditindaklanjuti (%)			
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Presentase unit pelayanan publik yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (%)	100%	100%	100
4.	Meningkatnya kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah	Presentase kebutuhan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi (%)	100%	100%	100
5.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah	Capaian nilai evaluasi AKIP (%)	70 (B)	64,02)* (B)	91,45%)*
6.	Meningkatnya capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Presentase potensi SDA yang teridentifikasi (%)	100%	100%	100
7.	Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian pembangunan	Presentase pengadaan barang jasa yang difasilitasi ULP (%)	100%	100%	100
8.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah	Tingkat pengelolaan penatausahaan Sekretariat Daerah (%)	100%	100%	100
<b>Rata – rata</b>					96,43

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran Sekretariat Daerah merupakan capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana capaian tahun 2021 tidak bisa dibandingkan secara keseluruhan dengan tahun – tahun sebelumnya

dikarenakan setiap tahun program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak selalu sama dan karena indikator – indikator tersebut merupakan indikator dalam dokumen perencanaan tahun 2016 – 2021. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1 : Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis**

Kinerja sasaran ini mencapai 80 % dalam usaha mencapai sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 ( satu ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

Table 3.2  
Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis

NO	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2019	CAP. TH. 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	CAPAIAN	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	100%	80,28%	100 %	80 %	80	100%	Tercapai dengan kategori Baik
Rata – rata						80		

Dari tabel diatas nampak indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 80 %, Jika dibandingkan capaiam kinerja tahun sebelumnya capaian kinerja mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 0,28 %, hal ini juga berpengaruh terhadap capaian target jangka menengah/ target akhir renstra yang telah ditetapkan. Penurunan capaian kinerja ini dikarenakan adanya Pandemi COVID19 dan terbitnya kebijakan pemerintah terkait PPKM level 3 sehingga kegiatan yang bersifat kerumunan masa ditiadakan dan Adanya larangan pemberangkatan jamaah haji tingkat nasional serta refocusing anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak jadi dilaksanakan.

Adapun kegiatan keagamaan yang difasilitasi diantaranya:

- a. Kegiatan hari Besar Keagamaan yaitu Peringatan Isro' Mi'raj, Peringatan Nuzulul Qurán, Peringatan 1 Muharam ( Tahun Baru Hijriyah) dan Peringatan hari raya Idul Adha

- b. Kegiatan Khitan massal, yang diikuti 94 peserta anak dari keluarga yang kurang mampu
- c. Pemberian bantuan berupa pembagian hewan kambing kepada sebagian masyarakat yang tidak mampu di wilayah Kabupaten Pekalongan.
- d. Doa bersama Bupati Pekalongan yang diikuti anak yatim/non panti dan tokoh masyarakat

Guna mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis pemberian tunjangan kepada Takmir Masjid dan pengasuh/guru ngaji pondok pesantren sejumlah 845 orang yang diberikan satu kali dalam setahun hal ini sebagai mana perwujudan dari 12 mandat rakyat yang ke 4 (empat) yaitu “Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di daerah atas, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan wiyata bakti, guru dan guru madrasah (MI, MTs dan MA), guru MDA/TPQ/TPA, pengasuh pondok pesantren, Takmir masjid serta guru ngaji (ustadz)”.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis yaitu Adanya Pandemi Covid-19 dan terbitnya kebijakan pemerintah PPKM.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yaitu mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan bekerja dari rumah/ *Work From Home*, Kegiatan yang dilaksanakan secara daring/*online* dan berkoordinasi secara horizontal dan vertikal.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Harmonis adalah sebesar Rp. 7.096.960.700 dan terserap sebesar Rp. 6.400.586.200 dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 696.374.500.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 Subkegiatan:
  - a) Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
  - b) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

- c) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

**Sasaran 2 : Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.**

Kinerja sasaran ini mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 ( satu ) indikator kinerja pencapaian sasaran pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2019	CAP. TH. 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	CAPAIAN	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai dengan kategori Baik
Rata – rata						100%		

Dari tabel diatas indikator - indikator berhasil mencapai capaian kinerja sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan capaian kinerja, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/ target akhir renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah telah tercapai 100%.

Dalam mencapai indikator Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti Bagian Hukum Setda melaksanakan meningkatnya koordinasi, kajian permasalahan peraturan perundang-undangan. Tahun 2021 produk hukum yang ditindaklanjuti berupa 6 (enam) Peraturan Daerah dan 71 (Tujuh Puluh Satu) Peraturan Bupati.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis sebagai berikut :

- a. Kurangnya koordinasi dan peran aktif dari Perangkat Daerah dalam proses penyusunan produk hukum daerah sehingga mengakibatkan keterlambatan/membutuhkan waktu yang lama.

- b. Prosedur dalam penyusunan peraturan daerah tergantung dengan jadwal kegiatan yang diagendakan oleh pihak Legislatif sehingga apabila jumlah peraturan daerah yang ditetapkan dalam tahun berjalan tidak memenuhi rencana maka akan mengakibatkan rendahnya capaian kinerja dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- c. Fungsi Bagian Hukum dalam rangka pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum belum berjalan dengan optimal karena masih terkendala dengan SDM pengelola, serta sarana dan prasarana JDIIH yang memadai.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala adalah sebagai berikut :

- a. Perlu adanya koordinasi dan peran aktif dari Perangkat Daerah dalam penyusunan suatu produk hukum daerah.
- b. Perlu adanya bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah;
- c. Perlu meningkatkan sarana prasarana (komputer, printer, scanner, dll) dan penambahan SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan SJDIIH Hukum dengan menggunakan TIK berbasis internet.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebesar sebesar Rp. 594.173.400 dan terealisasi sebesar Rp. 444.423.080 dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp 149.750.320.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, terdiri dari 3 Subkegiatan :

- a) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- b) Fasilitasi Bantuan Hukum
- c) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

### **Sasaran 3 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.**

Kinerja sasaran ini mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.4**  
**Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2019	CAP. TH. 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTR A	KET
				TARGET	CAPAIAN	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase unit pelayanan publik yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (%)	97,78	100	100,00%	100,00%	100,0	100,00%	Tercapai dengan kategori Baik
Rata – rata						100,0	100,00%	

Dari tabel tersebut nampak bahwa indikator menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, sama seperti capaian tahun sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pada Tahun 2021 semua unit pelayanan publik sejumlah yaitu sejumlah 45 Perangkat Daerah telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan mengirimkan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ke Bagian Organisasi Dan kepegawaian Setda untuk di lakukan skoring nilai IKM. Dan secara keseluruhan bila dibandingkan dengan target jangka menengah capaian kinerja ini sudah menunjukkan keberhasilan capaian yaitu menunjukkan capaian sebesar 100%.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis yaitu masih adanya keterlambatan unit pelayanan publik dalam menyusun Survey Kepuasan Masyarakat dan mengirimkan datanya ke Bagian Organisasi Dan kepegawaian untuk di lakukan skoring nilai IKM.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yaitu melakukan fasilitasi penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat dan melakukan penagihan data ke Organisasi Perangkat Daerah sebagai perwujudan dalam menjalankan amanat RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, Tahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 1.221.900.300 dan terealisasi sebesar Rp. 1.021.250.875 dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 200.641.425.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan Kegiatan:
  - a. Administrasi Tata Pemerintahan, terdiri dari 3 Subkegiatan, :
    - a) Penataan Administrasi Pemerintahan

- b) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- c) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
- b. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah, dengan subkegiatan :
  - a) Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan, dengan kegiatan :
  - a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, terdiri dari 2 Subkegiatan :
    - a) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
    - b) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

**Sasaran 4 : Meningkatkan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah.**

Kinerja sasaran ini mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 ( Satu ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.5  
Meningkatkan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2019	CAP. TH. 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	CAPAIAN	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Presentase kebutuhan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi (%)	100%	100%	100%	100%	100	100%	Tercapai dengan kategori Baik
Rata-rata						100		

Dari tabel tersebut nampak bahwa indikator berhasil menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan capaian kinerja, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/ target akhir renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah telah tercapai 100%, capaian kinerja ini indikator ini merupakan indikator pelayanan administrasi perkantoran yang mana merupakan kegiatan rutin disetiap tahunnya.

Pada dasarnya untuk mencapai sasaran Meningkatkan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, tidak ada kendala yang cukup berarti karena program dan

kegiatan merupakan kegiatan rutin, untuk mencapai sasaran tersebut disikapi dengan memaksimalkan fungsi dan kerja SDM.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran sasaran meningkatkan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, Tahun 2021 pagu anggaran Rp. 3.502.732.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.092.739.146 dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 409.992.854

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
  - a. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
    - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    - b) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - b. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, yang terdiri dari Subkegiatan :
    - a) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
    - b) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
  - c. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, yang terdiri dari subkegiatan :
    - a) Fasilitasi Keprotokolan

**Sasaran 5 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.**

Kinerja sasaran ini mencapai 91,45% dalam usaha mencapai sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 ( satu ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.6**  
**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**  
**dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2019	CAP. TH. 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	CAPAIAN	(%)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Capaian nilai evaluasi AKIP	60,52	64,02	70 (B)	64,02*)	91,45	70	Tercapai dengan kategori Baik
Rata-rata						91,45		

\*) data diolah s.d 14 januari Nilai sakiip 2019 menggunakan tahun lalu (masih menunggu penyerahan LHE)



Dari tabel tersebut nampak bahwa indikator berhasil menunjukkan capaian kinerja sebesar 91,45% tercapai dengan kategori baik.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Tahun 2021 masih menunggu pemberitahuan penerimaan hasil LHE nilai AKIP sehingga capaian menggunakan Tahun 2020 dengan nilai “B”. Adapun nilai yang dicapai adalah 64,02 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 60,52. Tahun 2020 dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten selain menyajikan SAKIP Tingkat Pemerintah Kabupaten juga menyajikan SAKIP tingkat Perangkat Daerah dengan menentukan 20 (dua puluh ) Perangkat Daerah sebagai sampel yaitu Bappedalitbang, Inspektorat, Dindikbud, Dinkes, Dinas Sosial, DPU Taru, Dinlutkan, Dinas PMD P3A PPKB , Disperindagkopumkm, Dinporapar, Dinas PM PTSP Naker, Dinas Perhubungan, Dinas Perkim LH, Dinkominfo, SatpolPP, BPKD, BKD Diklat, BPBD , RSUD Kraton Dan Kecamatan Talun.

Adapun komponen dan perolehan nilai sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	20,35 %	20,23 %	21,25	21,63
2.	Pengukuran Kinerja	25%	15,13%	14,35%	14,41	14,50
3.	Pelaporan Kinerja	15%	9,44%	10,75%	10,81	10,95

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2017	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020
4.	Evaluasi Internal	10%	2,87%	6,01%	6,68	6,84
5.	Capaian Kinerja	20%	10,92%	9,18%	10,36	10,11
	Total	100%	58,72%	60,52%	63,51	64,02
			CC	B	B	B

\*) data diolah s.d 14 januari Nilai sakiip 2019 menggunakan tahun lalu (masih menunggu penyerahan LHE)

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis antara lain :

1. Dalam pelaksanaan evaluasi atas SAKIP bukan hanya dokumen LKjIP saja yang disajikan tetapi ada dokumen – dokumen lain yang perlu disajikan bersama dengan OPD sampel.
2. Adanya rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang perlu ditindak lanjuti.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi data capaian kinerja secara berkala yang dituangkan dalam aplikasi e-sakip.
2. Menyajikan dokumen – dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam evaluasi atas SAKIP dan menunjuk serta menghadirkan OPD sampel.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, Tahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 912.184.300 dan terealisasi sebesar Rp. 809.626.093 dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 102.558.207.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
    - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Penataan Organisasi, dengan subkegiatan :
    - a) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    - b) Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

- c) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

**Sasaran 6 : Meningkatkan capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.**

Kinerja sasaran ini mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 ( satu ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam table berikut ini :

Tabel 3.7  
Meningkatnya capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup.

NO	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2019	CAP. TH. 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	CAPAIAN	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase potensi SDA yang teridentifikasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	Tercapai dengan kategori Baik
Rata-rata						100		

Dari tabel tersebut nampak bahwa indikator berhasil menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan capaian kinerja, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/ target akhir renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah telah tercapai 100% tercapai dengan kategori baik.

Pada Tahun 2021 potensi SDA yang teridentifikasi yaitu potensi galian C berupa andesit dan diorit, adapun rincian potensi tersebut:

1. Andesit yang terdapat di 1 (satu) Kecamatan, yaitu :
  - a. Desa Klesem Kecamatan Kandangserang seluas 7 Hektar
  - b. Desa Lambur Kecamatan Kandangserang seluas 9 Hektar
2. Diorit, yang terdapat di 7 (tujuh) kecamatan yaitu:
  - a. Kecamatan Kandangserang seluas 1.167 Hektar
  - b. Kecamatan Paninggaran seluas 2.119 Hektar

- c. Kecamatan Petungkriyono seluas 2.313 Hektar.
- d. Kecamatan Doro seluas 1.029 Hektar.
- e. Kecamatan Lebakbarang seluas 3.307 Hektar.
- f. Kecamatan Kajen seluas 933 Hektar.
- g. Kecamatan Karanganyar seluas 213 Hektar.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 310.326.000 dan terealisasi sebesar Rp. 77.647.993 dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 232.678.007, adanya efisiensi anggaran ini terkait dengan adanya penyesuaian PMK 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Permendagri 050/03708 Tahun 2020.

Pada dasarnya untuk mencapai sasaran Meningkatnya capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, tidak ada kendala yang cukup berarti karena program dan kegiatan merupakan kegiatan rutin, untuk mencapai sasaran tersebut disikapi dengan memaksimalkan fungsi dan kerja SDM dan melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan :
  - a. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, terdiri dari subkegiatan :
    - a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
    - b) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

**Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian pembangunan.**

Kinerja sasaran ini mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 ( satu ) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.8**  
**Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian pembangunan**

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2019	CAP. TH. 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	CAPAIAN	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Presentase pengadaan barang jasa yang difasilitasi ULP	100%	100%	100%	100%	100	100%	Tercapai dengan kategori Baik
Rata-rata						100	100%	

Dari tabel tersebut nampak bahwa indikator berhasil menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan capaian kinerja yaitu 100%, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/ target akhir renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah telah tercapai 100%.

Tahun 2021 Jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang masuk melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 152 paket dan pemilihan penyedia melalui proses tender yang dilaksanakan oleh pokja pemilihan sebanyak 152 paket dengan 2 paket pekerjaan yang gagal tender. Paket yang gagal tersebut adalah :

1. Pengadaan Genset dan Panel pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Naker, gagal tender dikarenakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sehingga Tender dibatalkan
2. Belanja Modal Mobil Ambulance pada RSUD Kajen, gagal tender dikarenakan hanya ada 1 peserta yang memasukkan penawaran sehingga tender dibatalkan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis yaitu :

1. Terlambatnya penginputan paket pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Oleh Pengguna Anggaran.
2. Terjadi error di Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
3. Terlambatnya dokumen tender yang di masukkan ke UKPBJ dari PPK disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran di Perangkat Daerah untuk penanganan covid-19.

4. Lambatnya penyampaian kembali dokumen tender dari PPK setelah dilakukan kaji ulang oleh Kelompok Kerja Pemilihan.
5. Kurangnya Pengembangan Kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ Kab. Pekalongan.

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yaitu :

1. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis dalam penginputan paket pekerjaan di sistem SIRUP sehingga tepat waktu, memberikan petugas pendampingan (fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa) dalam persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
2. Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik agar memanfaatkan LPSE Support yang ada.
3. Bersurat kepada Perangkat Daerah Se- Kabupaten Pekalongan untuk segera memasukkan berkas tender sehingga tender dapat terlaksana di awal tahun anggaran.
4. PPK agar segera merevisi hasil kaji ulang oleh Kelompok Kerja Pemilihan dan segera menyampaikan kembali.
5. Meningkatkan Kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ Kab. Pekalongan dengan Bintek ataupun Uji Kompetensi yang diselenggarakan LKPP yang dibiayai oleh pemerintah.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas administrasi pengendalian pembangunan, Tahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 1.574.492.600 dan terealisasi sebesar Rp. 1.421.858.661 dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 152.633.939

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan kegiatan:
  - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan subkegiatan:
    - a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    - b) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
    - c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
  - b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan subkegiatan :
    - a) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
    - b) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
    - c) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Sasaran 8 : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.

Kinerja sasaran ini mencapai 100% dalam usaha mencapai sasaran, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam table berikut ini :

Tabel 3.9

Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2019	CAP. TH. 2020	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2019 TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	CAPAIAN	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tingkat pengelolaan penatausahaan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai dengan kategori Baik
Rata-rata						100%		100%

Dari tabel tersebut nampak bahwa indikator berhasil menunjukkan capaian kinerja sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun sebelumnya capaian kinerja ini tidak mengalami perubahan capaian kinerja, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah/ target akhir renstra yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Sekretariat Daerah telah tercapai 100%.

Pengelolaan penatausahaan Sekretariat Daerah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengelolaan, pengendalian dan pelayanan ketatausahaan, pengelolaan arsip, serta pengelolaan kepegawaian dilingkungan sekretariat daerah. Adapun terkait dokumen naskah/ surat dinas mencatat sampai dengan pendistribusian ke perangkat daerah/ unit kerja sesuai disposisi pimpinan guna untuk tindak lanjut. Indikator ini merupakan indikator pendukung penyelenggaraan administrasi perkantoran yang rutin dilaksanakan dalam setiap tahunnya.

Pada dasarnya untuk mencapai sasaran Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah, tidak ada kendala yang cukup berarti karena program

dan kegiatan merupakan kegiatan rutin, untuk mencapai sasaran tersebut disikapi dengan memaksimalkan fungsi dan kerja SDM.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah, Tahun 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 11.491.456.460 dan terealisasi sebesar Rp. 10.880.469.723 dengan demikian menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar Rp. 610.986.737.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Permerintah Daerah Kab/Kota, dengan kegiatan:
  - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
    - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu
    - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
    - a) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan :
    - a) Pengadaan Mebel
    - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan :
    - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan :
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan subkegiatan :
  - a) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam usaha mencapai sasaran jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 Dan Dokumen RKPD Tahun 2021 , Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai 5 (lima) indikator kinerja pencapaian sasaran seperti nampak dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.10**  
**Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu**  
**Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2016 – 2021 Dan RKPD 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS (RPJMD)	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	REALISASI 2020	TARGET (RPJMD) 2021	REALISASI 2021	(%)	TARGET AKHIR RKPD	Keterangan
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kegiatan fasilitasi pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan agama dan perwujudan kondisi kerukunan beragama	Cakupan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	100.00%	100%	100%	80 %	80 %	100.00%	Tercapai dengan kategori BAIK
		Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang mendapat bantuan (%)	60%	92,85%	100%	96,1%	96,1%	100.00%	Tercapai dengan kategori BAIK

2	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip good governance.	Persentase penyelesaian Peraturan Perundangan tepat waktu %	100.00 %	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Tercapai dengan kategori BAIK
		Hasil Implementasi SAKIP	B	B	BB	B)*	100	BB	B
3	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten serta layanan perizinan usaha jasa konstruksi	Persentase Tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)	65%	72,22%	90%	10%	11,11%	90%	Tidak Tercapai

\*) data diolah s.d 14 Januari Nilai sakiip 2019 menggunakan tahun lalu (masih menunggu penyerahan LHE)

1. Capaian kinerja indikator Cakupan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%) tercapai sebesar 80% artinya Tahun 2021 ada 4 kegiatan keagamaan yang difasilitasi dari 5 keseluruhan kegiatan keagamaan yang direncanakan.
2. Capaian Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang mendapat bantuan tercapai sebesar 96,1 artinya Tahun 2021 jumlah 1300 Lembaga Dari jumlah Keseluruhan Lembaga pendidikan keagamaan yang diusulkan sebanyak 1353 orang, sebanyak 53 (lima puluh tiga) tidak mendapat bantuan dikarenakan kurang memenuhi syarat setelah dilakukan verifikasi ulang.
3. Capaian Persentase penyelesaian Peraturan Perundangan tepat waktu tercapai 100% Tahun 2021 produk hukum yang ditindaklanjuti berupa 6 (Enam) Peraturan Daerah dan 71 (Tujuh Puluh Satu) Peraturan Bupati.
4. Hasil Implementasi SAKIP tercapai dengan predikat B dengan capaian nilai sebesar 64,02 capaian kinerja ini merupakan capain tahun 2020 dikarenakan hasil

evaluasi tahun 2021 belum disampaikan oleh Kemnetrian PAN dan RB ke Kab/ Kota di diwilayah jateng (Wilayah 3).

5. Persentase Tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) Tahun 2021 tercapai dengan nilai 11,11% capaian kinerja ini jauh dari target yang ditetapkan dikarenakan ada beberapa Instrumen dari SIPJAKI yang tidak bisa di Input dari 7 Layanan hanya satu layanan yang bisa diinput yaitu profil Tim Pebinan Jasa Konstruksi (TPJK) karena ada pengembangan aplikasi SIPJAKI dan adanya peraturan tentang SIPJAKI yang semula Peraturan Kementerian PU Nomor 1 Tahun 2014 (SIPJAKI masuk dalam SPM) sedangkan sekarang Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 (SIPJAKI masuk dalam IKK) dengan didukung pula adanya Peraturan Perizinan terintegrasi (OSS)

Adapun capaian kinerja pada sasaran dan indikator sebagaimana tabel diatas akan dituangkan secara rinci kedalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021

#### **D. REALIASASI ANGGARAN**

Dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2021, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan memperoleh dana bersumber dari APBD II yang berupa anggaran belanja pengadaan dan anggaran belanja non pengadaan.

Belanja Non Pengadaan atau yang dulu disebut Belanja Tidak Langsung (Anggaran gaji dan tunjangan pegawai) sebesar Rp. 14.279.726.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.140.767.896 dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.138.958.104,00. Belanja pengadaan atau belanja langsung diluar belanja pegawai Rp. 26.894.015.760 terealisasi sejumlah Rp. 24.287.748.573 sisa anggaran Rp. 2.606.267.187. Dengan keseluruhan belanja pengadaan maupun belanja non pengadaan sebesar Rp. 41.173.741.760 realisasi Rp. 37.428.516.469 sisa anggaran Rp. 3.745.225.291 Terdapatnya sisa anggaran karena ada efisiensi dan pengeluaran belanja sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan jumlah dana belanja langsung dan dana bantuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan terinci sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dari anggaran Rp. 924.412.900 terserap sejumlah Rp. 849.861.975 dan sisa anggaran Rp. 74.550.925.
- b. Dilaksanakan oleh Bagian Hukum dari anggaran Rp. 594.173.400 terserap sejumlah Rp. 444.423.080 dan sisa anggaran Rp. 149.750.320,00
- c. Dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dari anggaran Rp. 607.813.400,00 terserap sejumlah Rp. 249.036.893,00 dan sisa anggaran Rp. 358.776.507,00
- d. Dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan dari anggaran Rp. 435.662.100,00 terserap sejumlah Rp. 399.793.900,00 dan sisa anggaran Rp. 35.868.200,00
- e. Dilaksanakan oleh Bagian Kesra dari anggaran Rp. 7.096.960.700,00 terserap sejumlah Rp. 6.400.586.200,00 dan sisa anggaran Rp. 696.374.500,00
- f. Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Dan Kepegawaian dari anggaran Rp. 1.313.494.400,00 dan terserap sejumlah Rp. 1.083.167.847,00 dan sisa anggaran Rp. 230.326.553,00
- g. Dilaksanakan oleh Bagian Umum dari Rp. 29.062.394.360,00 terserap sejumlah Rp. 26.979.581.813,00 dan sisa anggaran Rp. 2.082.812.547,00
- h. Dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dari Rp. 1.138.830.500,00 terserap sejumlah Rp. 1.022.064.761,00 dan sisa anggaran Rp. 116.765.739,00.

Dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan administrasi keuangan secara tertib sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersirat dalam Bab III, maka dapat diketahui sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari 8 (delapan)** sasaran adapun nilai pencapaian terendah pada sasaran: **“Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis” dengan capaian kinerja sebesar 80%**, sedangkan tingkat pencapaian sasaran tertinggi atau yang mencapai nilai **100%** terdapat 6 sasaran yaitu :

1. Meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Meningkatnya kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah
4. Meningkatnya capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup
5. Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian pembangunan
6. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah

Nilai rata-rata Pencapaian Kinerja yang telah diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar **96,43%**, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.

#### **B. Prestasi yang diraih di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.**

Prestasi/ Penghargaan/ Kejuaraan/ Lomba Tahun 2021 yang diraih oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah :

1. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik meraih penghargaan tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Nasional untuk inovasi Aplikasi KUDU SEKOLAH

2. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik meraih tingkat Nasional yaitu : Top 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk inovasi SAPU JAGAD, JUNJANG ADMINDUK
- C. Hal – hal yang ingin dicapai ditahun mendatang
- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah
  - 2) Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja.
  - 3) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah.
  - 4) Melaksanakan penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum serta pengembangan SJDH Hukum dengan menggunakan TIK berbasis internet dan peningkatan SDM yang berbasis IT.
  - 5) Meningkatkan pembinaan tri kerukunan umat beragama.
  - 6) Meningkatkan pelaksanaan pemantapan/penguatan E-SAKIP.
  - 7) Melaksanakan pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan melaksanakan evaluasi kelembagaan dan penyusunan Perbup Analisis Jabatan
  - 8) Meningkatkan kinerja dan Reformasi Birokrasi.
  - 9) Meningkatkan koordinasi ke Perangkat Daerah terkait penginputan SIRUP dan SIMPEL.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan yang dapat kami sampaikan, sebagai acuan kerja selanjutnya.

Kajen, 22 Februari 2022



**MATRIK CAPAIAN KINERJA  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	SERAPAN	SELISIH	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	%								
1	Meningkatkan kegiatan fasilitasi pemerintah untuk mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis	Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	100,00	80,00	80,00	100,00	80,00	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>7.096.960.700</b>	<b>6.400.586.200</b>	<b>696.374.500</b>	<b>BAG. KESRA</b>
									Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.343.112.100	1.117.068.800	226.043.300	
									Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	5.458.428.400	5.215.422.500	243.005.900	
									Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	295.420.200	68.094.900	227.325.300	
2	Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Produk Hukum yang ditindaklanjuti (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>594.173.400</b>	<b>444.423.080</b>	<b>149.750.320</b>	<b>BAG. HUKUM</b>
									Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	190.082.400	189.328.750	753.650	
									Fasilitasi Bantuan Hukum	250.561.000	169.588.830	80.972.170	
									Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	153.530.000	85.505.500	68.024.500	
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Unit Pelayanan Publik yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>765.547.500</b>	<b>720.133.083</b>	<b>45.414.417</b>	<b>BAG.TAPEM</b>
									Penataan Administrasi Pemerintahan	267.848.500	259.733.621	8.114.879	
									Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	274.728.000	256.226.000	18.502.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	SERAPAN	SELISIH	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	%								
								Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	222.971.000	204.173.462	18.797.538		
								Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	158.865.400	129.728.892	29.136.508	BAG.TAPEM	
								Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	158.865.400	129.728.892	29.136.508		
							Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	297.487.400	171.388.900	126.098.500	BAG. PEREKONOMIAN	
								Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	51.427.400	28.822.200	22.605.200		
								Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	246.060.000	142.566.700	103.493.300		
4	Meningkatnya kinerja Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah	Persentase Kebutuhan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.573.800.500	1.332.438.590	241.361.910	BAG. UMUM
								Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	768.932.500	764.682.954	4.249.546		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	SERAPAN	SELISIH	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	%								
								Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	804.868.000	567.755.636	237.112.364		
								<b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>1.843.881.500</b>	<b>1.684.530.556</b>	<b>159.350.944</b>	<b>BAG. UMUM</b>	
								Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.034.824.100	948.416.505	86.407.595		
								Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	809.057.400	736.114.051	72.943.349		
								<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>85.050.000</b>	<b>75.770.000</b>	9.280.000		
								Fasilitasi Keprotokolan	85.050.000	75.770.000	9.280.000		
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Capaian Nilai Evaluasi AKIP	70 (B)	B	100,00	70 (B)	100,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>29.480.300</b>	<b>25.919.650</b>	<b>3.560.650</b>	<b>BAG. ORPEG</b>
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.480.300	25.919.650	3.560.650		
								<b>Penataan Organisasi</b>	<b>882.704.000</b>	<b>783.706.445</b>	<b>98.997.555</b>	<b>BAG. ORPEG</b>	
								Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	259.829.000	230.828.850	29.000.150		
								Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	260.252.000	243.954.073	16.297.927		
								Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	94.257.000	90.734.465	3.522.535		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	SERAPAN	SELISIH	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	%								
									268.366.000	218.189.057	50.176.943		
6	Meningkatnya capaian kinerja dan koordinasi pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Persentase potensi SDA yang teridentifikasi	100	100	100	100	100	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	310.326.000	77.647.993	232.678.007	BAG. PEREKONOMIAN
									275.000.000	46.346.800	228.653.200		
									35.326.000	31.301.193	4.024.807		
7	Meningkatnya kualitas administrasi pengendalian pembangunan	Persentase Pengadaan Barang Jasa yang difasilitasi ULP (%)	100	100	100	100	100	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1.138.830.500	1.022.064.761	116.765.739	Bagian PBJ
									Pengelolaan, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	844.480.000	733.111.415	111.368.585	
									Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	248.723.100	247.398.085	1.325.015	
									Pengelolaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	45.627.400	41.555.261	4.072.139	
								Program Perekonomian Dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	435.662.100,00	399.793.900	35.868.200	BAG. PEMBANGUNAN
									Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	41.782.500	30.497.900	11.284.600	
									Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	133.665.400	128.197.400	5.468.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	SERAPAN	SELISIH	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	%								
									Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	260.214.200	241.098.600	19.115.600	
8	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah.	Tingkat pengelolaan penatausahaan Sekretariat Daerah	100	100	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.560.454.650</b>	<b>2.364.365.057</b>	196.089.593	<b>BAG. UMUM/ BAG.ORPEG</b>
									Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.628.000	26.488.000	7.140.000	BAG.ORPEG
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	156.162.000	112.658.800	43.503.200	BAG.ORPEG
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	418.162.650	408.658.050	9.504.600	BAG. UMUM
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	133.043.200	127.074.500	5.968.700	BAG. UMUM
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.477.200	103.537.140	16.940.060	BAG. UMUM
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.934.500	108.900.500	12.034.000	BAG. UMUM
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.098.845.100	1.092.622.400	6.222.700	BAG. UMUM
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.202.000	384.425.667	94.776.333	BAG. UMUM
									<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>14.652.476.000</b>	<b>13.465.985.896</b>	<b>1.186.490.104</b>	<b>BAG. UMUM</b>
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.279.726.000	13.140.767.896	1.138.958.104	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	SERAPAN	SELISIH	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	%								
								Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	372.750.000	325.218.000	47.532.000		
								<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.699.286.520</b>	<b>2.539.594.900</b>	<b>159.691.620</b>	<b>BAG. UMUM</b>	
								Pengadaan Mebel	755.346.600	686.239.400	69.107.200		
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.943.939.920	1.853.355.500	90.584.420		
								<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>3.297.194.810</b>	<b>3.151.554.423</b>	<b>145.640.387</b>	<b>BAG. UMUM</b>	
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.009.000.500	1.007.920.441	1.080.059		
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	507.164.400	490.136.750	17.027.650		
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.781.029.910	1.653.497.232	127.532.678		
								<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.540.040.380</b>	<b>2.504.489.191</b>	<b>35.551.189</b>	<b>BAG. UMUM</b>	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.315.615.500	1.290.201.223	25.414.277		
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	764.263.800	760.851.500	3.412.300		
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	460.161.080	453.436.468	6.724.612		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RENSTRA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	SERAPAN	SELISIH	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	REALISASI	%								
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	211.820.100	134.394.962	77.125.148	BAG. ORPED
									Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	117.862.100	112.939.124	5.042.976	
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93.958.000	21.455.828	72.082.172	
Jumlah										41.173.741.790	37.428.318.469	3.745.423.321	

22 Februari 2022


  
 KEMENTERIS DAERAH  
 KABUPATEN PEKALONGAN  
 M. YUSUF HANAN, S.Sos, M.Si  
 Pembina/K.1  
 NIP. 197003010000031008

**RINCIAN REALISASI KEGIATAN  
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
	<b>Bagian Umum</b>	<b>29.062.394.360</b>	<b>26.979.581.813</b>	<b>92,83</b>	<b>2.082.812.547</b>	<b>7,17</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.279.726.000	13.140.767.896	92,02	1.138.958.104	7,98
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	372.750.000	325.218.000	87,25	47.532.000	12,75
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	418.162.650	408.658.050	97,73	9.504.600	2,27
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	133.043.200	127.074.500	95,51	5.968.700	4,49
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.477.200	103.537.140	85,94	16.940.060	14,06
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.934.500	108.900.500	90,05	12.034.000	9,95
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.098.845.100	1.092.622.400	99,43	6.222.700	0,57
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	479.202.000	384.425.667	80,22	94.776.333	19,78
9	Pengadaan Mebel	755.346.600	686.239.400	90,85	69.107.200	9,15
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.943.939.920	1.853.355.500	95,34	90.584.420	4,66
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.009.000.500	1.007.920.441	99,89	1.080.059	0,11
12	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	507.164.400	490.136.750	96,64	17.027.650	3,36
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.781.029.910	1.653.497.232	92,84	127.532.678	7,16
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	1.315.615.500	1.290.201.223	98,07	25.414.277	1,93
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	764.263.800	760.851.500	99,55	3.412.300	0,45
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	460.161.080	453.436.468	98,54	6.724.612	1,46
17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	768.932.500	764.682.954	99,45	4.249.546	0,55
18	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	804.868.000	567.755.636	70,54	237.112.364	29,46
19	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.034.824.100	948.416.505	91,65	86.407.595	8,35
20	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	809.057.400	736.114.051	90,98	72.943.349	9,02

NO	Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
21	Fasilitasi Keprotokolan	85.050.000	75.770.000	89,09	9.280.000	10,91
<b>JUMLAH</b>		<b>29.062.394.360</b>	<b>26.979.581.813</b>	<b>92,83</b>	<b>2.082.812.547</b>	<b>7,17</b>
	<b>Bagian Tapem</b>	<b>924.412.900</b>	<b>849.861.975</b>	<b>91,94</b>	<b>74.550.925</b>	<b>8,06</b>
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	267.848.500	259.733.621	96,97	8.114.879	3,03
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	274.728.000	256.226.000	93,27	18.502.000	6,73
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	222.971.000	204.173.462	91,57	18.797.538	8,43
4	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	158.865.400	129.728.892	81,66	29.136.508	18,34
	<b>Bagian Hukum</b>	<b>594.173.400</b>	<b>444.423.080</b>	<b>74,80</b>	<b>149.750.320</b>	<b>25,20</b>
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	190.082.400	189.328.750	99,60	753.650	0,40
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	250.561.000	169.588.830	67,68	80.972.170	32,32
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	153.530.000	85.505.500	55,69	68.024.500	44,31
	<b>Bagian Organisasi dan Kepegawaian</b>	<b>1.313.494.400</b>	<b>1.083.167.847</b>	<b>82,46</b>	<b>230.326.553</b>	<b>17,54</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.480.300	25.919.650	87,92	3.560.650	12,08
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	117.982.100	112.939.124	95,73	5.042.976	4,27
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93.538.000	21.455.828	22,94	72.082.172	77,06
4	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	33.628.000	26.488.000	78,77	7.140.000	21,23
5	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	156.162.000	112.658.800	72,14	43.503.200	27,86
6	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	259.829.000	230.828.850	88,84	29.000.150	11,16
7	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	260.252.000	243.954.073	93,74	16.297.927	6,26
8	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	94.257.000	90.734.465	96,26	3.522.535	3,74
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	268.366.000	218.189.057	81,30	50.176.943	18,70
	<b>Bagian Pembangunan</b>	<b>435.662.100</b>	<b>399.793.900</b>	<b>91,77</b>	<b>35.868.200</b>	<b>8,23</b>
1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	41.782.500	30.497.900	72,99	11.284.600	27,01
2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	133.665.400	128.197.400	95,91	5.468.000	4,09

NO	Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	260.214.200	241.098.600	92,65	19.115.600	7,35
	<b>Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>7.096.960.700</b>	<b>6.400.586.200</b>	<b>90,19</b>	<b>696.374.500</b>	<b>9,81</b>
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.343.112.100	1.117.068.800	83,17	226.043.300	16,83
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	5.458.428.400	5.215.422.500	95,55	243.005.900	4,45
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	295.420.200	68.094.900	23,05	227.325.300	76,95
	<b>Bagian Perekonomian</b>	<b>607.813.400</b>	<b>249.036.893</b>	<b>40,97</b>	<b>358.776.507</b>	<b>59,03</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	51.427.400	28.822.200	56,04	22.605.200	43,96
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	246.060.000	142.566.700	57,94	103.493.300	42,06
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	275.000.000	46.346.800	16,85	228.653.200	83,15
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	35.326.000	31.301.193	88,61	4.024.807	11,39
	<b>Bagian Pengadaan Barang/Jasa</b>	<b>1.138.830.500</b>	<b>1.022.064.761</b>	<b>89,75</b>	<b>116.765.739</b>	<b>10,25</b>
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	844.480.000	733.111.415	86,81	111.368.585	13,19
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	248.723.100	247.398.085	99,47	1.325.015	0,53
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	45.627.400	41.555.261	91,08	4.072.139	8,92
	<b>TOTAL SETDA</b>	<b>41.173.741.760</b>	<b>37.428.516.469</b>	<b>90,90</b>	<b>3.745.225.291</b>	<b>9,10</b>